**Hegemoni Kekuasaan Tokoh Broto Dimas dalam Novel *Opera Indonesia* Karya Joko Santoso HP**

**Oleh: Dedi Saputra**

**Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia FIB UNJA**

**ABSTRAK**

Saputra, Dedi. 2017. *Hegemoni Kekuasaan Tokoh Broto Dimas dalam Novel Opera Indonesia Karya Joko Santoso HP.* Skripsi, Program Studi Sastra Indonesia, FIB Universitas Jambi, Pembimbing: (1) Dra. Irma Suryani, M.Pd, (II) Dwi Rahariyoso, S.S, M.A.

**Kata Kunci** : Novel, hegemoni kekuasaan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik hegemoni kekuasaan tokoh Broto Dimas dalam novel *Opera Indonesia* dan menjelaskan fase terwujudnya hegemoni kekuasaan tokoh Broto Dimas dalam novel *Opera Indonesia.*

Penelitian ini merupakan penelitian deskritif kualitatif dengan pendekatan objektif. Data pada penelitian ini adalah teks yang terdapat dalam novel *Opera Indonesia.* Sumber data yang digunakan adalah novel *Opera Indonesia* karya Joko Santoso HP diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama pada tahun 2012. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah data penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk praktik hegemoni kekuasaan tokoh Broto Dimas dalam novel *Opera Indonesia* terbagi menjadi dua praktik yaitu, (1) *counter* hegemoni, (2) hegemoni. Hegemoni dipraktikan dengan cara (1) Membangun Kesadaran Kaum Intelekual Organik, (2) Membangun Kesadaran Lembaga/Partai, (3) Membangun Kesadaran Masyarakat. Fase terwujudnya hegemoni kekuasaan tokoh Broto Dimas dalam novel *Opera Indonesia* yaitu (1) Fase Pendidikan Kritis, (2) Fase Lembaga.

Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa praktik hegemoni kekuasaan dilakukan melalui *counter* hegemoni dan hegemoni. *Counter* hegemoni dilakukan Broto Dimas untuk menumbangkan rezim penguasa sedangkan hegemoni dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, praktek hegemoni kekuasaan tersebut melewati dua fase yaitu, fase pendidikan kritis dan fase lembaga.

**PENDAHULUAN**

Karya sastra lahir di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang bersosial-budaya sudah tentu sastra itu sendiri yang merekam segala perjalanan dan perkembangan sosial-budaya suatu masyarakat. Wellek dan Warren (1993:109) berpendapat bahwa Sastra menyajikan kehidupan yang sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra juga meniru alam dan dunia subjektif manusia yang relatif. Apapun yang termaktub dalam karya sastra bukanlah serta-merta imajinasi ilusif pengarangnya yang berada dalam kekosongan budaya. Sebagai produk kebudayaan , karya sastra tidak dapat dilepaskan dari efek sosial, politik, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Karya sastra memberikan pengetahuan tentang berbagai hal yang mungkin saja belum diketahui pembaca. Sastra merupakan sarana yang digunakan pengarang yang berisi ide dan gagasan. Sesuai dengan hakekat sastra yaitu *Dulce* dan *Utile* yang artinya indah dan berguna.

Prosa dalam hal ini novel merupakan karya sastra yang bersifat fiksi, merefresentasikan kisah kehidupan tokoh. Novel *Opera Indonesia* karya Joko Santoso HP ini merupakan sebuah novel yang menggambarkan pergolakan politik di Indonesia pada masa Orde Baru hingga Reformasi. Partai politik yang ikut serta dalam pemilu tidak sepenuhnya mengusung misi reformasi, yaitu menuju demokrasi yang seutuhnya. Partai politik hanya dijadikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan yang berisi kepentingan pribadi dan kelompok. Tokoh Broto Dimas, dalam novel *Opera Indonesia* ini memandang fenomena tersebut sebagai suatu kekacauan politik yang kemudian menimbulkan keinginannya untuk merubah kondisi yang ada dengan cara terlibat dalam partai politik dan berupaya mencapai kekuasaan.

Usaha tokoh Broto Dimas dalam mendapatkan kekuasaan inilah yang dipandang sebagai bentuk hegemoni. Hegemoni diartikan sebagai kepemimpinan moral dan intelektual. Tokoh Broto Dimas dengan segala ide-ide dan keintelektualan yang dimilikinya berupaya meyakinkan rekan politik dan masyarakat untuk mendukung gagasannya dalam melakukan perubahan sosial politik yang kemudian ia mendapat dukungan penuh dari partai politiknya untuk dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke tujuh. Hal inilah yang tergambar dalam novel *Opera Indonesia.* Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:(1) Bagaimana praktik hegemoni kekuasaan yang diterapkan tokoh Broto Dimas, (2) Bagaimana fase terwujudnya hegemoni kekuasaan tokoh Broto Dimas dalam novel *Opera Indonesia*.

**LANDASAN TEORI**

**Hakikat Novel**

Kata novel berasal dari kata *novella* (Prancis) yang dalam bahasa jerman disebut *novelle* dan *novel* dalam bahasa inggris. (Nurgiantoro,2000 : 9). Secara harfiah novel berarti sebuah barang baru yang kecil. Novel merupakan karya sastra berbentuk prosa ditulis dalam bentuk naratif yang dalam pengisahan tentang tokohnya terdapat konflik tertentu. Menurut Clara Leeve (dalam Wellek dan Werren, 1993:282) novel merupakan gambaran kehidupan nyata pada masa tertentu. Novel mengungkapkan seluruh episode perjalanan hidup tokoh dalam ceritanya. Novel mengungkapkan unsur-unsurnya secara lebih mendalam, sehingga pengungkapan tema, alur, tokoh, latar, disajikan secara terperinci atau dengan kata lain, novel menerang jelaskan gambaran kehidupan kepada pembaca apa adanya. Novel juga diartikan sebagai suatu karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku (Nurgiantoro:2000:17).

Sebagai karya sastra novel tentunya lahir dari kebudayaan yang melingkupi kehidupan pengarangnya. Sebagaimana yang dikatakan Nursito (dalam portalgaruda.org/article.php (20/7/2017) “novel adalah media penuangan pikiran, perasaan, dan gagasan penulis dalam merespon kehidupan di sekitarnya.” Ketika di dalam kehidupan sekitar muncul permasalahan baru, nurani penulis novel akan terpanggil untuk segera menciptakan sebuah cerita. Berdasarkan kualitasnya novel dibagai menjadi dua, yaitu novel populer dan novel serius. Adapun novel *Opera Indonesia* karya Joko Santoso HP ini dapat dikategorikan sebagai novel serius.

**Tokoh dan Penokohan**

Tokoh merupakan unsur pembangun terpenting dalam sebuah karya naratif, karena tokohlah yang menjalani atau mengalami segala peristiwa dalam cerita tersebut. Menurut Abrams (dalam Nurgiantoro, 2000: 166) “tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif yang oleh pembaca memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan lewat ucapan dan tingkah lakunya.” Pembaca menilai pembedaan tokoh yang satu dengan yang lainnya lebih ditentukan oleh kualitas pribadi atau watak dari pada tampilan fisiknya. Todorov (dalam eprint.uny.ac.id, hlm 23) mengatakan bahwa tokoh memiliki peran penting dalam suatu cerita, “Dalam karya sastra, tokoh seakan-akan memainkan sebuah peran dari kedudukan utama dan merupakan awalan yang mengatur unsur-unsur lainnya dalam cerita.”

Sedangkan penokohan merujuk pada kualitas moral atau karakter seorang tokoh dalam suatu cerita naratif. Jones (dalam Nurgiantoro, 2000: 166) mengatakan bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penokohan atau perwatakan melukiskan yang berkenaan dengan tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat berupa pandangan hidupnya, sikap, keyakinan, adat-istiadat, dan sebagainya. Menurut Sudjiman (dalam portalgaruda.org/article/23-27) Ada dua cara untuk menggambarkan tokoh cerita, yaitu cara langsung dan cara tak langsung. Penokohan secara langsung dilakukan oleh pengarang dengan cara memaparkan saja watak tokohnya baik secara fisik atau ciri lahiriyah maupun batin atau watak tokoh, dan dapat juga menambahkan komentar tentang watak tersebut oleh pihak ketiga.

**Kekuasaan**

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku dan biasanya politik dianggap sebagai bentuk perjuangan mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan itu (Budiardjo, 2009: 18). Dalam prakteknya kekuasaan melakukan hubungan dua arah yang menitikberatkan pada konsep *“power to”* dan *“power over”* gagasan Keith Dowding. *“power to”* mengacu pada apa yang dapat dilakukan Aktor A selaku pemimpin dengan kekuasaannya itu. Sedangkan “*power over”* merujuk pada Aktor A memiliki kuasa untuk memerintah Aktor B (bawahan) untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai keinginannya. (Daniel, 2004:3).

Dalam menjalankan kekuasaannya, penguasa dapat menyelenggarakannya dengan dengan berbagai cara, mulai dari yang paling klasik, yaitu kekerasan fisik (dominasi), *koersi* atau ancaman akan pemberian sanksi. Atau dengan cara persuasi, cara inilah yang paling banyak digunakan pada saat ini. Dan ada pula yang mengggunakan cara pemberian *reward* atau imbalan. Misalnya, pemerintah ingin setiap kampung terlihat bersih, untuk menggerakan massa melakukan pembersihan itu, pemerintah dapat memberikan *reward* kepada kampung yang paling bersih ( Budiardjo, 2009: 62). Dalam konsep kekuasaan juga dikenal istilah *“domain of power”* gagasan Jack H. Nagel yang merujuk pada siapa saja yang dikuasai oleh individu atau kelompok yang berkuasa. Kemudian membangun sebuah hubungan yang kurang seimbang sehingga muncul ketergantungan, dominasi, dan hegemoni.

**Praktik Hegemoni Kekuasaan**

Untuk mendapatkan kekuasaan dengan jalan hegemoni, maka dilakukan praktek hegemoni berupa *counter* hegemoni dan hegemoni.

1. ***Counter* Hegemoni**

Supremasi kelas atau kelompok didapat dengan dua jalan yaitu dominasi dan hegemoni. Dominasi umumnya dijalankan kepada seluruh yang dianggap musuh oleh penguasa atau adanya kelompok subordinat yang mencoba mengganggu kekusaannya. Kelompok subordinat yang melakukan pembangkangan atau bahkan perebutan kekuasaan terhadap penguasa inilah yang disebut sebagai *counter* hegemoni. Menurut Faucolt (dalam Nurhadi, 2007: 243) “bahwa dalam wacana kekuasaan selalu ada tindakan penolakan atau perlawanan baik secara fisik atau kepemimpinan intelektual terhadap kelas penguasa yang disebut *counter* hegemoni.” Kelas penguasa dengan segala kekuasaannya baik berupa alat-alat kekerasan maupun agen hegemoninya (kaum intelektual) mendapat hegemoni tandingan dari kelompok subordinat dengan tujuan melemahkan hegemoni penguasa terhadap masyarakat lainnya.

Menurut Faruk (dalam Nurhadi, 2004: 247) *counter* hegemoni adalah tindakan politik maupun fisik dari kelompok subordinat untuk menolak ideologi yang datang dari luar kelompoknya. Masyarakt subordinat membangun kekuatan politiknya dalam menghadapi rezim penguasa. Gramsci dalam bahasan teorinya memberi solusi untuk melakukan *counter* hegemoni dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan. Seperti halnya untuk mendapatkan kekuasaan, *counter* hegemoni dapat dipandang sebagai counter hegemoni tulen atau tanpa adanya praktek dominasi dan counter hegemoni yang disetai dominasi.

1. **Hegemoni**

Istilah hegemoni berasal dari kata “Eugemonia” yang secara literal berarti “kepemimpinan”. Kepemimpinan yang dimaksudkan tidak hanya difokuskan pada kepemimpinan negara, tetapi kepemimpinan yang mencakup segala aspek. Gramsci, sebagai tokoh yang mempelopori eksisnya teori hegemoni ini mengarti bahwa hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang penindasan. Menurut Faruk (dalam Rizqi, 2007: 128) Gramsci menerapkan hegemoni dalam meneliti bentuk-bentuk politik, kultural, dan ideologi tertentu dalam suatu masyarakat yang ada. Di mana ada satu kelas fundamental yang dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu yang berbeda dari bentuk dominasi pada umumnya.

Menurut Ramses (2008: 194) “bahwa dalam praktiknya hegemoni dibentuk oleh kekuasaan, di mana kelas penguasa ingin mendapatkan konsensus atau dukungan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Konsensus tersebut didapat dengan cara sukarela” Konsensus tersebut lahir karena adanya rasa takut akan ancaman, hubungan kekerabatan, imbalan, dan kesadaran. Pada dasarnya untuk menjadi kelompok penguasa, kelompok tersebut harus mampu mewakili kepentingan umum agar konsensus berjalan dengan baik.

Menurut Roger Simon (dalam Daniel, 2004: 10) “hegemoni adalah sebuah hubungan yang bukan melalui cara dominasi atau kekerasan, tetapi terbentuk atas dasar persetujuan atau cara-cara kepemimpinan politik dan ideologis.” Intinya bagaimana mengorganisir kesepakatan atau persetujuan bersama. Menurut Heryanto dan Kristanto (dalam Candra, 2011: 41) “Untuk mempertahankan kekuasaannya, negara tidak mungkin terus-menerus memakai kekuatan dominasi, justru yang diperlukan adalah mendapatkan dukungan dari orang-orang yang dikuasai.”

**Kaum Intelektual**

Menurut Gramsci (dalam Rizqi, 2014:130) kaum intelektual ialah mereka yang aktivitas intelektualnya diarahkan untuk memproduksi dan menyebarkan filsafat, teori politik maupun teori ekonomi sebagai sebuah pandangan dunia yang koheren guna mencapai dan memelihara hegemoni sosial dan pemerintahan. Kaum intelektual dalam negara ikut berperan dalam teori hegemoni Gramsci. Menurut Patria (2015: 158) kaum intelektual selalu menampilkan fungsi organisatornya baik di dalam wilayah masyarakt sipil maupun masyarakat politik atau negara. Kelompok intelektual terdiri dari: kelompok intelektual tradisional dan kelompok intelektual organik. Intelektual tradisional adalah kaum intelektual yang terbatas pada lingkungan masyarakat perdesaan seperti petani, buruh, nelayan, tengkulak, juragan, dan borjuis kota kecil . Intelektual organik adalah intelektual dan para organisator politik dan pada saat yang sama juga sebagai bos-bos perusahaan, petani-petani kaya atau manajer perumahan, penguasa komersial dan industri, mahasiswa, dosen, guru besar, dan sebagainya. Kaum intelektual organik menyadari bahwa identitasnya merupakan barisan terdepan dalam tatanan ekonomi dan politik.

**Fase Terwujudnya Hegemoni Kekuasaan**

Menurut Gramsci (dalam Patria dan Arief, 2015: 127) terdapat dua fase pembentukan hegemoni yang bertujuan untuk mendapatkan konsensus, yaitu fase pendidikan Kritis dan fase lembaga

1. **Pendidikan Kritis**

Menurut Faolu Freire (dalam Taufik, 2017:3) pendidikan merupakan suatu *pilot project* dan agen dalam melakukan perubahan sosial untuk membentuk masyarakat baru. Sementara itu menurut Nuryanto (dalam Taufik, 2017: 3) bahwa pendidikan diyakini sebagai suatu instrumen yang harus memiliki posisi strategis dalam menciptakan negara dan kesadaran masyarakat. Dalam perspektif pendidikan kritis sekolah memiliki peran yang penting dalam membentuk kehidupan politik dan kultural. Menurut pandangan Gramsci untuk mengkontruksikan kesadaran masyarakat ke arah yang ditentukan oleh subjek hegemoni adalah melalui pendidikan kritis.

1. **Lembaga**

Wilayah lembaga atau partai merupakan wilayah kesetujuan mutlak. Jika anggota lembaga tersebut ada yang tidak berorientasi pada kepentingan lembaga tersebut maka akan ada sanksi-sanksi yang diberikan. Jadi fase lembaga atau partai merupakan fase yang paling menentukan kekuatan hegemoni dari seorang pemimpin.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terhadap novel *Opera Indonesia* karya Joko Santoso ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2005: 60) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan pendeskripsian fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini memberikan deskripsi fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2009: 53). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan hanya pada objek kajian.

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam novel *Opera Indonesia* maka ditemukan dua model praktik hegemoni yang diterapkan tokoh Broto Dimas untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya yaitu melalui *counter* hegemoni dan hegemoni. *Counter* hegemoni dilakukan atas aparatus negara Orde Baru yang dinilai tidak dapat menyejahterakan rakyat sedangkan hegemoni dilakukan atas kaum intelektual organik, lembaga atau partai, dan masyarakat umum.

Pada novel *Opera Indonesia*  ini terdapat delapan kutipan yang berkaitan dengan praktik *counter* hegemoni. Jenis *counter* hegemoni yang dilakukan oleh tokoh Broto Dimas dan rekan-rekan mahasiswanya lainnya adalah *counter* hegemoni yang mengerahkan kekuatan fisik (dominasi) yang direalisasikan lewat aksi atau demontrasi. Seperti pada kutipan berikut:

Bro mengambil alih kembali *megaphone* itu dan meriakkan tuntutan kami.

“Rekan-rekan mahasiswa. Kita, rakyat, ditolak masuk ke dalam gedung rakyat ini. Mereka…,” ia menunjuk polisi-polisi itu, “ Tidak bersalah. Mereka hanya menjalankan tugasnya. Kita juga menjalankan tugas kita. Majuuu!”

Ratusan kami segera merengsek ke depan mendengar aba-aba Bro. Bro segera menyerahkan megaphone itu kepada Kerto. Bergerak cepat ke depan di sayap kiri. Bro berpesan bahwa kami berdua harus berpencar supaya bisa mengontrol formasi.

Kami saling menyilangkan lengan dan merapatkan tubuh supaya semakin kokoh mendorong ke depan. Semakin kuat kami mendorong, semakin kuat pula polisi-polisi itu mendorong balik. (Santoso, 2012: 28).

Kutipan di atas sesuai dengan pendapat Faruk (dalam Nurhadi, 2004: 247) “bahwa *counter* hegemoni dilakukan karena adanya upaya dari kelas yang dikuasai (massa) untuk tidak menerima ideologi, gagasan, atau kebijakan yang datang dari luar kelompoknya.”

Setelah berhasil melengserkan kekuasaan rezim Orde Baru tindakan selanjutnya yang dilakukan Broto Dimas adalah membangun hegemoni sebagai upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Hegemoni kekuasaan tokoh Broto Dimas ini dimulai pada fase lembaga atau partai politik. Hegemoni dipraktikkan dengan membangun kesadaran dari kaum intelektual, membangun kesadaran lembaga atau partai politik, dan membangun kesadaran masyarakat. Seperti pada kutipan berikut:

“Negeri ini punya segala-galanya yang tidak dimiliki Jepang, malaysia, Korea apalagi Singapura. Kita memiliki sumber daya alam terbaik di dunia, juga sumber daya manusia yang sulit ditandingi negara lain,” ia tetap meledak-ledak.” Tapi puluhan juta rakyat di negeri yang kaya raya ini tetap miskin!”

“Itu semua karena lemahnya pegawasan. Mengapa pengawasan lemah?”

“Karena pemerintah memang tidak ingin ada pengawasan!” sambarnya yakin. “Inilah substansi dari diktatorial di mana kekuasaan berpusat hanya di satu tangan. Setiap kekuasaan cenderung korup. Dan kekuasaan yang absolut… *absolutely corrupt!”* (Santoso,2012: 58).

Opini dan wacana kritis yang diucapkan Broto Dimas kepada Jeihan tersebut merupakan upaya menghegemoni tokoh Jeihan untuk berpikir kritis mengenai realitas negara dan untuk mendapatkan konsensus. Kesepakatan yang didapat Broto Dimas dari Jeihan adalah kesepakatan yang lahir dari hubungan kekerabatan dan kesadaran sendiri dari Jeihan. Sebagaimana pendapat (Ramses, 2008: 194).” konsensus atau kesepakatan lahir karena adanya rasa takut akan ancaman, hubungan kekerabatan, imbalan, dan kesadaran.”

Untuk mendapatkan dukungan masyarakat Broto Dimas memberikan gambaran realitas yang banyak ketimpangan di negeri ini yang kemudian ia memberikan solusi-solusi untuk permasalahan tersebut, seperti yang dinyatakan pada kutipan berikut:

Bro bahkan melontarkan konsep yang sangat berani tentang hutang luar negeri itu dalam kampanyenya.

“Kita harus berani untung mengemplang hutang-hutang yang bertumpuk itu!” teriak Broto Dimas dalam kampanye Pilpresnya. “Mengapa?” Bukan membayar hutang yang penting… tapi perut rakyat yang kosong lebih penting. Kita harus gunakan APBN kita untuk mengenyangkan perut saudara-saudara kita yang bertahun-tahun kelaparan. Kita tidak wajib menanggung hutang yang tidak pernah kita rasakan manfaatnya selama ini!” (Santoso, 2012: 158).

Dalam novel *Opera Indonesia* karya Joko Santoso HP tokoh Broto Dimas melewati fase pendidikan kritis sebelum masuk kepada fase lembaga atau partai. Seperti pada kutipan berikut:

Aku dan Presidenku, Broto, pernah kuliah di kampus yang sama. Aku di Fakultas Sastera, di di Teknik. Sejak mahasiswa, aku mengenalnya sebagai tokoh yang selalu berpikir kritis. Teman-teman menyebutnya sebagai idealis. Juga militan. Citra itu pulalah yang kemudian mendongkrak Broto menjadi tokoh. Usia kami sebaya, ia hanya terpaut setahun lebih tua dariku. (Santoso, 2012: 9).

Hal ini sependapat dengan Yanuardi (dalam staffnew.unj.ac.id) bahwa gerakan intelektual tranformatif mahasiswa yang artinya gerekan intelektual mahasiswa berusaha melahirkan gagagsan-gagsan yang lahir dari proses dialektika sosial dengan lingkunganya. Sedangkan fase lembaga adalah Wilayah yang merupakan wilayah kesetujuan mutlak. Wilayah yang mewajibkan setiap anggotanya untuk tunduk dan patuh atas kebijakan yang ada.

Tak terkecuali Bro. Ramalanku di kampus dulu bahwa ia akan menjadi tokoh nasional terbukti. Sejarah seakan memandu Bro untuk menapaki altar politik nasional. Ia memenuhi sumpahnya untuk suatu saat akan kembali ke panggung politik jika situasi memungkinkan. (Santoso, 2012: 102-103).

Kutipan di atas membuktikan bahwa tokoh Broto Dimas memasuki fase lembaga/ partai politik sebagai upaya mendapat hegemoni kekuasaan.

“Saya sudah berusaha, Sekjen. Tapi mohon maaf… saya tidak ahli soal internet. Saya kesulitan teknis untuk membuat *website* pribadi,” Tubuh Husin Raya, anggota DPR-RI itu, gemetar mencoba membela diri.

“*Sorry*, itu bukan jawaban. Dengan penghasilan puluhan juta rupiah…sangat mudah bagi Anda untuk mempekerjakan orang menangani website. Itu kesalahan anda yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa mentolerir anggota Badan Anggaran DPR dari PIP bermain mata dengan eksekutif.” (Santoso, 2012: 115-116).

Kutipan di atas menunjukan bahwa tokoh Broto Dimas pada fase ini memiliki posisi strategis untuk melakukan praktek hegemoninya. Partai yang merupakan wadah tumbuh kembangnya ideologi dan kepentingan akan mudah dikendalikan oleh intelektual organik yang memiliki kuasa lebih dominan dalam partai politik tersebut.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa novel *Opera* *Indonesia* karya Joko Santoso HP ini terdapat dua praktik hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh tokoh Broto Dimas praktik hegemoni kekuasaan tersebut meliputi *counter* hegemoni dan hegemoni. *Counter* hegemoni diwujudkan dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa yang bertujuan untuk mejatuhkan rezim kekuasaan Orde Baru. Setelah rezim Orde Baru tumbang, maka tokoh Broto Dimas melakukan hegemoni yang diwujudkan dengan cara membangun kesadaran kaum intelektual organik, membangun kesadaran lembaga atau partai, dan membangun kesadaran masyarakat.

Hegemoni dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari kaum intelektual organik, lembaga atau partai dan masyarakt agar mendukungnya menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah kekuasaan tersebut didapatkan, hegemoni tetap dilakukan sebagai cara mempertahankan kekuasaan. Hegemoni yang dilakukan tokoh Broto Dimas dapat dikategorikan sebagai hegemoni total (integral) karena kaum intelektual organik dan masyarakat sepenuhnya setuju terhadap kebijakan-kebijakan tokoh Broto Dimas. Terwujudnya hegemoni kekuasaan tokoh Broto Dimas melalui dua fase hegemoni, yaitu fase pendidikan kritis dan fase lembaga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdillah, Taufik. 2017. “Peran Cendekiawan dalam Pengembangan Pendidikan Kritis di Indonesia”, *Skripsi,* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adampe, Regina Yolanda. 2015. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Novel Detik Terakhir Karya Akberthiene Endah. *Jurnal* *Universitas Sam Latulangi*. Manado, hlm 1-20.

Afiduddin. 2015. “Pendidikan dengan Pendekatan Marxis-Sosialis.”*Jurnal Adabiyah.* Vol.15, No. 2.

Atmazaki.1990. *Ilmu Sastra Teori dan Terapan*. Padang: Angkasa Jaya.

Budiardjo, Mariam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dinata, Candra. 2011. “Aplikasi Teori Strukturalisme Genetik, Feminisme, Sastra dan Politik, Teori Hegemoni, Resepsi Sastra dalam Penelitian Mahasiswa”, *Jurnal Parafrase*, vol. 11, No. 01, hlm 41.

Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Caps.

Gotllieb, S. Roger. 1989. *An Anthology of Westren Marxism: From Lukacs & Gramsci to Socialist-Feminism.* New York: Oxford University Press.

Hardian, Sandi. “Pendekatan Pendidikan Kritis *Gramscian* Sebagai Upaya Kontra Hegemoni Pendidikan. [www.academia.edu/diakses](http://www.academia.edu/diakses) pada tanggal 29 November 2017.

http//digilib.unila.ac.id/pendekatan karya sastra/diakses tanggal 29 November 2017.

http//jurnalisis.dps.ac.id/Saptomo/ diakses tanggal 12 Agustus 2017.

http//eprint.uny.ac.id/ diakses tanggal 12 Agustus 2017.

http//portalgaruda.org/article.php/Nursito/ diakses tanggal 12 Agustus 2017.

http//file.upi.edu/direktori/Halimah.pdf/ diakses tanggal 14 Agustus 2017

Hutagalung, Daniel. 2004. “Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi”, *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan HAM”*, No. 12, hlm 1-17.

H.P, Joko Santoso. 2012. *Opera Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jusriani. 2015. “Konflik Tokoh dalam Novel Rindu Karya Tere Liye (Tinjauan Psikologi Sastra)”, *Jurnal Humanika* Vol. 3, No. 15, hlm 1-15.

Kartono. 2010. “Pendidikan Kritis dan Reformasi Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Kependidikan.” Vol. 11, No.1.*

K.M, Saini. 1995. *Protes Sosial dalam Sastra.* Bandung: Angkasa.

Kurniawan, Heru. 2007. “ Relasi Fomatif Hegemoni Gramsci dalam Novel Perburuan Karya Pramoedya Ananta Toer”, *Jurnal Ibda’*, Vol. 5, No.1, hlm 157-175.

library.walisongo.ac.id/digilib/download.php/ diakses tanggal 29 Agustus 2017

Mahayana, Maman S. 2005. *9 Jawaban Sastra Indonesia.* Jakarta: Bening Publishing.

Murpratama, Dian Ayu. 2012. “Aspek Sosial dalam Novel Pusara Arus Waktu Karya Gola Gong: Tinjauan Sosiologi Sastra dan Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA”, *Skripsi,* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nurhadi. 2004. “Analisis Hegemoni Pada *Iblis Tidal Pernah Mati* Karya Seno Gumira Ajidarma”, *Jurnal Litera,* Vol. 3, No. 2, hlm. 242-255.

Nurgiantoro, Burhan. 2000. *Teori Pengkajian Fiksi.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pakpahan, Hertati. 2014. “ Nilai-Nilai Sosial dalam Novel Opera Indonesia Karya Joko Santoso HP (Kajian Sosiologi Sastra)”, *Skripsi,* Medan: Universitas Negeri Medan.

Patria, Nezar dan Andi Arief. 2015. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Pawestri, Salikhatin. 2015. “Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Bibir Merah Karya Ahmad Munif”, *Skripsi,* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Prasetya, Imam Yudhi. “Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik.” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pemerintahan.” Vol. 1, No. 1.*

Ratna, Nyoman Kutha. 2009. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Repository.upi.edu/384816/s\_psi\_chapter 3/Sukmadinata/ diakses tanggal 15 Aguustus 2017.

Rozi, Ahmad Bahrur. 2014. “Pendidikan dalam Perspektif Teori Kritis.”*Jurnal Pelopor Pendidikan.* Vol. 5, No. 1.

Sehandi, Yohanes. 2016. *Mengenal 25 Teori Sastra.* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Semi, Atar. 1985. *Kritik Sastra.* Bandung: Angkasa.

Solihin, M. Saddam. 2016. “Ideologi Sosialisme Indonessia Perspektif Partai Rakyat Demokratik.” *Skripsi.* Lampung: Universitas Negeri Lampung.

Sumardjo, Jakob. 1983. *Memahami Kesusastraan.* Bandung: Penerbit Alumni.

Suroso.2015. “Bahasa, Sastra dan Kekuasaan” Makalah Seminar Nasional UNY. Yogyakarta, 26 November.

Turama, Akhmad Rizqi. 2014. “Pergeseran Kekuasaan Negara dan Relasi Antar Subjek dalam Cerpen Orba dan Reformasi”, *Jurnal Poetika* Vol. 11, No. 2, hlm 127-136.

Wellek, Rene dan Austin Waren. 1993. *Teori Kesusastraan.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wijakangka, Agga Ramses. 2008. “Analisis hegemoni Kekuasaan dalam Novel *Pabrik* Karya Putu Wijaya”, *Jurnal Artikulasi,* Vol. 5, No.1, hlm. 187-213.

Zainab, Nurul. 2012. “Paradigma Pendidikan Kritis.”*Tesis.* Malang: Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim.